

BAB II

GAMBARAN UMUM DPRD dan PROFIL PIMPINAN DPRD

2.1. Daerah Pemilihan di Jawa Tengah

Pada pemilu legislatif tahun 2009 untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi sepuluh daerah pemilihan (dapil) dengan total jumlah kursi yang diperebutkan adalah 100 kursi²⁵. Pembagian dapil untuk pemilihan DPRD tingkat Provinsi di Jawa Tengah adalah sama dengan pembagian Dapil untuk pemilihan anggota DPR RI. Berikut adalah table pembagian daerah pemilihan di Jawa Tengah, yaitu :

Tabel 2.1
Daerah Pemilihan DPRD Prov. Jateng dalam Pileg 2009

DAERAH PEMILIHAN	WILAYAH KABUPATEN/KOTA
Jawa Tengah I	Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal
Jawa Tengah II	Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
Jawa Tengah III	Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang
Jawa Tengah IV	Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri
Jawa Tengah V	Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta
Jawa Tengah VI	Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung
Jawa Tengah VII	Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga
Jawa Tengah VIII	Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas
Jawa Tengah IX	Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal
Jawa Tengah X	Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan

2.2 Peta Politik DPRD Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data rekapitulasi KPUD Jawa Tengah²⁶, hasil pemilu Legislatif tahun 2009 di Jawa Tengah, masih menempatkan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu legislatif dengan 3.438.406 suara. Hal ini memang tidak mengherankan karena Jawa Tengah bersama Provinsi Bali dikenal merupakan “kandang Banteng”, sejak pemilu 1955. Disusul oleh Partai Demokrat yang menduduki peringkat ke 2 perolehan suara dengan perolehan suara sebesar 2.355.620. Hal ini sangatlah wajar mengingat secara nasional Partai Demokrat mengalami kenaikan suara cukup signifikan. Partai Golkar yang pada pemilu legislatif 2004 menduduki peringkat kedua harus puas turun di peringkat ketiga pada pemilu 2009 setelah Partai Demokrat dengan perolehan suara sebesar 1.727.256 suara. Peringkat Ke empat perolehan suara terbesar adalah Partai kebangkitan Bangsa dengan 1.174.665 kemudian Partai Keadilan Sejahtera dengan 1.075.378 suara. Partai Amanat Nasional dengan 1.034.269 suara menduduki peringkat ke 6 disusul oleh Partai Persatuan Pembangunan dengan 929.661 suara.

Tiga Partai Politik Baru peserta pemilu legislatif 2009 menduduki peringkat ke tujuh perolehan suara yaitu Partai Gerindra dengan 800.959 suara, Hanura dengan 462.918 suara. Dan terakhir Partai Kebangkitan Nasional Ulama dengan 274.527 suara. Sedangkan 14 partai politik lainnya tidak memiliki wakil yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Namun demikian, perolehan suara tersebut tidak berbanding lurus dengan perolehan kursi di DPRD. Hal ini dikarenakan sistem pemilu yang dipakai di

Indonesia menggunakan sistem Parliamentary treshold. Parliamentary treshold adalah ketentuan batas minimal yang harus dipenuhi Partai Politik untuk bisa menempatkan calon legislatifnya di parlemen. Batas minimal yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif adalah sebesar 2,5 persen dari total jumlah suara dalam pemilu. Dengan ketentuan ini, Parpol yang tak beroleh suara minimal 2,5 persen tak berhak mempunyai perwakilan di DPR. Sehingga suara yang telah diperoleh oleh parpol tersebut dianggap hangus.

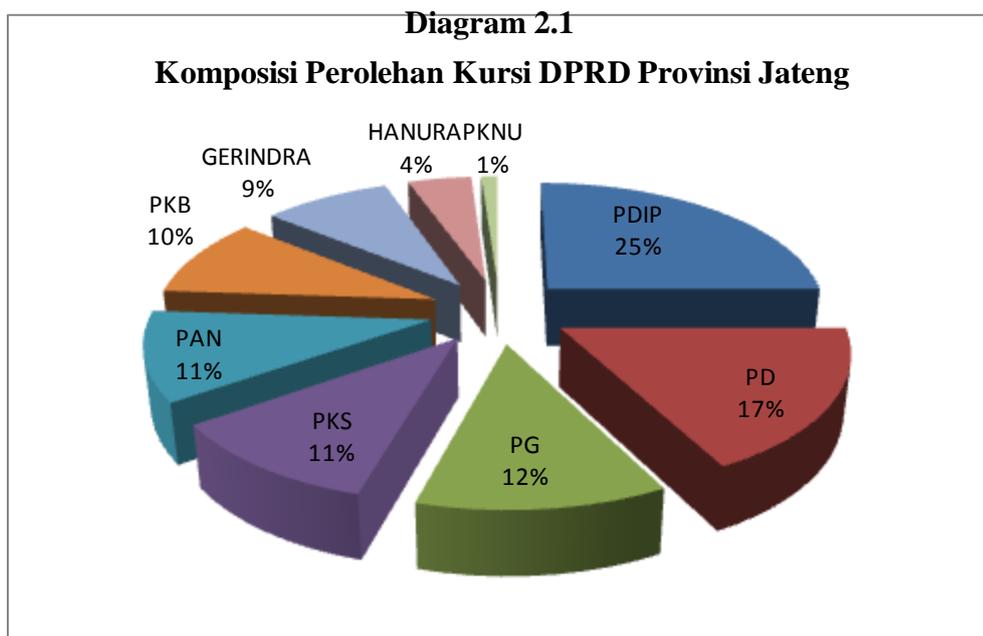
Dari Hasil Pemilu Legislatif 2009 terdapat perubahan cukup signifikan terhadap komposisi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2009-2010. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (2004-2009), PDI Perjuangan yang sebelumnya memiliki 31 anggota turun menjadi 23 anggota, Partai Golkar dari 17 anggota menjadi 11 anggota. PPP dari 10 anggota turun menjadi 7 anggota. PKB dari 10 anggota turun menjadi 9 anggota.

Tabel 2.2
Sepuluh Besar Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2009 di Jawa Tengah

NO	NAMA PARTAI	DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	DAPIL 6	DAPIL 7	DAPIL 8	DAPIL 9	DAPIL 10	TOTAL JATENG	JMLH KURSI
1	PDIP	275.448	170.201	334.234	433.698	499.400	323.198	322.294	456.866	331.233	291.734	3.438.306	23
2	P. DEMOKRAT	394.231	175.584	292.543	169.583	239.305	287.087	201.733	273.366	197.181	125.007	2.355.620	16
3	P. GOLKAR	160.902	126.307	247.078	191.572	196.990	187.383	153.596	197.350	118.546	147.532	1.727.256	11
4	PKS	143.569	75.294	87.948	135.888	170.985	107.326	94.758	90.773	100.453	68.384	1.075.378	10
5	PAN	78.295	93.397	47.689	75.606	162.484	130.785	123.230	123.414	88.057	111.312	1.034.269	10
6	PKB	106.643	103.204	138.931	35.779	45.191	212.659	81.515	84.738	196.594	169.411	1.174.665	9
7	P. GERINDRA	88.580	90.013	138.622	52.833	74.384	92.612	56.886	88.886	57.587	60.556	800.959	9
8	PPP	95.231	134.014	110.966	21.550	41.510	145.681	115.568	69.104	74.285	121.752	929.661	7
9	P.HANURA	58.379	46.803	62.875	30.320	49.826	58.495	25.914	40.365	41.298	48.643	462.918	4
10	PKNU	22.354	30.777	27.897	6.670	7.205	66.689	36.984	24.301	22.928	28.722	274.527	1
JUMLAH SUARA SAH JATENG		1.604.894	1.213.045	1.790.143	1.322.495	1.670.434	1.776.486	1.348.958	1.599.324	1.367.827	1.298.454	14.992.060	100
ALOKASI KURSI Angka Bilangan)		10	9	12	8	10	11	9	10	11	10	100	
		160.489	134.783	149.179	165.312	167.043	161.499	149.884	159.932	124.348	129.845	149.921	

Namun ada pula partai politik yang mengalami kenaikan jumlah anggota di samping partai politik baru yang berhasil menempatkan anggotanya di DPRD Jawa Tengah. Euforia kemenangan Partai Demokrat secara nasional juga terjadi di Jawa Tengah. Dari sebelumnya 10 kursi anggota meningkat menjadi 16 orang anggota. PKS dari 7 anggota meningkat menjadi 10 orang anggota. Sementara PAN tetap konstan dengan 10 anggotanya.

Tiga partai baru peserta pemilu juga berhasil menempatkan anggotanya di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Gerindra dengan 8 kursi anggota, Hanura 4 kursi, dan PKNU 1 kursi. Berikut komposisi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan asal partainya.



Dari 100 Anggota DPRD Jawa Tengah tersebut, 75 anggota merupakan pendatang baru dan hanya 25 orang saja yang merupakan anggota lama. Sejumlah wajah lama yang masih bertahan diantaranya :

Tabel 2.3
Nama Anggota Lama DPRD Jawa Tengah

PARTAI	NAMA ANGGOTA
PDIP	Ketua DPRD Jateng Murdoko (PDIP), Ketua Komisi D Rukma Setyabudi, Bambang Haryanto, Novita Wiyanti, SE, Sarei Abdul Rasyid SIP, dan Drs. Kartomo, MM
Partai Demokrat	Anik Amikawati (sekarang Ketua Fraksi PD), Doni Meiyudin, Husein Malik Trijanto, SH, serta HM. Ali Suyono.
Partai Golkar	Sasmito, Kusdilah, dan Sri Rahayu Amin Sudibyo
PKS	Kamal Fauzi, Agus Abdul Latif, Muh Haris, Mahmud Mahfudz, dan Abdul Fikri Faqih.
PPP	Masruhan Samsurie (sekarang ketua Fraksi PPP) dan Muhajir Ardian
PAN	Khafid Sirotudin, Sri Mulyani, dan M Riza Kurniawan
PKB	KH Syamsul Maarif dan Fuad Hidayat

Sumber : diolah dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2010

Selebihnya dominasi muka baru sangat terlihat, yaitu :

Tabel 2.4
Nama Anggota Baru DPRD Jawa Tengah

PARTAI	NAMA ANGGOTA
PDIP	Maria Tri Mangesti, Hendrar Prihadi, Ayuning Sekar Suci, Nuniek Sriyuningsih (Sekretaris DPD), A. Budhi Indarto SE, Asfirla Harisanto, Agus Wardoyo, Ir. Alwin Basri, Harri Pramono, Joko Purnomo, Messy Widiastuti, Samirun, Sri Ruwiyati, Slamet Efendi, Yanti Ernawati, dan Peni Dyah Perwitosari.
Partai Demokrat	Yoyok Sukawi, Atyoso Mochtar, Bambang Priyoko, Bambang Eko Purnomo, Joko Hariyanto, Sumadi, Sunar Nugroho, Yeni Sudiono, Haritsah, Tety Indarti, dan Lilik Haryanto
Partai Golkar	Rif'an, Bambang Sadono, dan Endang Maria Astuti, Suwardi, Zaenal MZ, Samsul Bachri, Bambang Sutoyo, Djoemali.
PKS	Arif Awaludin, Sri Praptono, Listyo Nugroho, dan Wahid Ahmadi.
PPP	Alfasadun, Istajib, Abdul Aziz, Yahya Haryoko, dan Khayatulmaki.
PAN	Jayus, Subandi, Mustolih, Sri Marnyuni, Amin Maksun, Asroeroedin Hadi, dan Wahyudin Noor Aly.
PKB	Jamal Yazid, Muh Zen Adv, Siti Rosidah, M. Chamim Irfani, Mustofa, MA Nopal Nadjib, dan Sukirman.
Gerindra	Mochamad Wasiman, Zaenal Abidin, Sri Wulan, Bambang Wachyono, Heri Pudyatmoko, Iskandar Zulkarnaen, Rachmat Mudjiono MRS, Sastro Sugiharto, dan Dwi Yasmanto.
Hanura	Solikhin, Merry Herlina, Titiek Maryani, dan Gatyt Sari Chotijah
PKNU	Ali Mahfudz

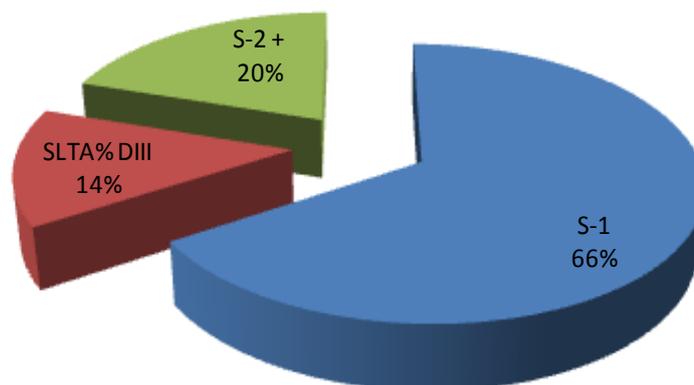
Sumber : diolah dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2010

Pada tanggal 3 November 2010, diadakan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah atas nama Hendrar Prihadi dikarenakan yang bersangkutan terpilih menjadi Wakil Walikota Semarang. Hendrar Prihadi digantikan oleh H. Masluri, SH, MH.

2.3. Jenjang Pendidikan

Dari jenjang pendidikan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014 ini mulai didominasi oleh para lulusan sarjana (S1) sebanyak 66 orang, pasca sarjana (S2-S3) 20 orang, dan masih ada anggota yang masih berpendidikan DIII ataupun SLTA namun jumlahnya tidak terlalu banyak yaitu 14 orang.

Diagram 2.2
Komposisi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2009-2014
Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : diolah dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2010

2.4. Fraksi

Fraksi merupakan jembatan antara partai politik dengan DPRD. Fraksi merupakan organ di DPRD yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD. Menurut Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah BAB VI Pasal 38, Tugas Fraksi adalah : (1) Merumuskan dan menjalankan hal-hal yang menjadi kebijakan partai politiknya, (2) Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing, (3) Meningkatkan kualitas, kemampuan disiplin, daya guna dan hasil guna anggota fraksi dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD, (4) Menyualurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota fraksi masing-masing, (5) Menetapkan setiap anggotanya dalam penugasan komisi-komisi, badan-badan, dan panitia khusus, (6) Melakukan pengawasan terhadap kinerja anggotanya dalam setiap kegiatan DPRD.

Sesuai dengan hasil Pemilu Legislatif 2009, DPRD Jawa Tengah memiliki 9 Fraksi (Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah BAB VI Pasal 37), yaitu :

Tabel 2.5
Nama Ketua Fraksi DPRD Jawa Tengah

No.	NAMA FRAKSI	KETUA
1	Fraksi PDIP	Ir. MG. Nuniek Sri Y, MS
2	Fraksi Partai Demokrat	Anik Amikowati, S.Sos, Msi
3	Fraksi Partai Golkar	Rifan, S.Ag, MM
4	Fraksi PKS	Arif Awaludin, SH, M.Hum
5	Fraksi PAN	Drs. Asroroedin Hasi
6	Fraksi PKB	Drs. Jamal Yazid, Msi
7	Fraksi Partai Gerindra	Zainal Abidin
8	Fraksi PPP	Masrukhan Syamsurie
9	Fraksi Partai Hanura dan PKNU (Hanuraku)	Solichin, ST

Sumber : diolah dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2010

2.5. Alat Kelengkapan DPRD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, maka DPRD memiliki tujuh alat kelengkapan yakni : Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Panitia Khusus

2.5.1. Pimpinan Dewan

Susunan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah 2009-2014 terdiri dari :

Ketua	: H. Murdoko, SH
Wakil Ketua I	: H. Bambang Priyoko, S.IP
Wakil Ketua II	: Dr. H. Bambang Sadono, SH, MH
Wakil Ketua III	: Drs. H. Fikri Faqih, MM
Wakil Ketua IV	: M. Riza Kurniawan

Susunan tersebut berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UU No. 27 Tahun 2009 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPRD dimana lima Partai Politik yang memiliki jumlah kursi terbanyak secara berurutan berhak untuk mengajukan wakilnya menjadi pimpinan DPRD.

Dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah BAB VII Pasal 46 Pimpinan DPRD mempunyai tugas untuk : (1) Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan, (2) Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua, (3) Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan

materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD, (5) Menjadi juru bicara DPRD, (6) Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD, (7) Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya.

2.5.2 Badan Musyawarah

Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Tengah menurut Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah BAB VII Pasal 55 terdiri dari 50 orang dengan satu orang ketua merangkap anggota, empat orang wakil ketua merangkap anggota dengan proporsional jumlah fraksi dan komisi.

Tugas Badan Musyawarah adalah : (1) Menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun sidang. Satu masa persidangan, atau sebagian dari masa sidang, perkiraan penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat Paripurna untuk mengubahnya, (2) Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, (3) Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing, (4) Menetapkan jadwal acara rapat DPRD, (5) Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan, (6) Merekomendasikan pembentukan panitia khusus, (7) dan Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat Paripurna kepada Badan Musyawarah.

Susunan Pimpinan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah sama dengan susunan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah.

2.5.3 Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang berifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi yang memiliki masa tugas paling lama satu tahun. Ketua, Wakil ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Berdasarkan bidang-bidang tugas yang ditangani, maka di DPRD Provinsi Jawa Tengah dibagi dalam lima komisi. Dimana masing-masing komisi memiliki tugas yang ditetapkan dalam Tata Tertib Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

menurut Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah BAB VII Pasal 58 Komisi mempunyai tugas untuk : (1) Mengupayakan kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan Daerah, (3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi, (4) Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD, (5) Menerima, menampung, dan membahas, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat, (6) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat daerah, (7) Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD, (8) Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat, (9) Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk

dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi, (10) Memberikan laporan hasil tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Berikut lima Komisi yang ada di DPRD Jawa Tengah dan bidang kerjanya

Tabel 2.6
Komisi-Komisi Di DPRD Jawa Tengah

KOMISI A Pemerintahan	KOMISI B Perekonomian	KOMISI C Anggaran	KOMISI D Pembangunan	KOMISI E Kesra
Ketertiban dan keamanan Kependudukan Informasi dan Komunikasi Hukum dan Perundang-undangan Perizinan Pertanahan Kepegawaian dan aparatur Sosial Politik Ormas	Perindustrian Perdagangan Pertanian Perikanan dan kelautan Peternakan Perkebunan Kehutanan Ketahanan pangan dan logistik Koperasi, UKM, dunia usaha	Keuangan daerah Pendapatan daerah Perpajakan Retribusi Perbankan BUMD dan perusda Perusahaan Patungan Penanaman Modal Badan Layanan Usaha Daerah	Bina marga Pemukiman dan tata ruang PSDA Perhubungan dan telekomunikasi Pertambangan Perumahan rakyat Lingkungan hidup	Tenaga kerja Pendidikan IPTEK Pemuda dan Olah raga Agama Budaya Sosial Kesehatan Transmigrasi Pemberdayaan perempuan pariwisata

Sumber : diolah dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2010

Setiap komisi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Ketua Komisi dan dibantu oleh Satu orang Sekretaris dan Seorang Wakil Ketua. Pimpinan Komisi tersebut di bentuk berdasarkan atas kesepakatan politik. Berikut Nama-Nama Ketua Komisi, Sekretaris, dan Wakil Ketua Komisi :

Tabel 2.7.
Nama Pimpinan Komisi DPRD Jawa Tengah

NAMA KOMISI	KETUA	SEKRETARIS	WAKIL KETUA
KOMISI A	Fuad Hidayat, S.Sos (FPKB)	Samsul Bachri, SH (F. PG)	Drs. Atyoso Mochtar (F. PD)
KOMISI B	Wasiman (F. Gerindra)	Yahya Haryoko (PPP)	M. Haris, S.Sos (PKS)
KOMISI C	Novita Wijayanti	Sukirman, S.Sos	Muhajir M. Ardian

	(F. PDIP)	(F. PKB)	(PPP)
KOMISI D	Rukma Setyabudi (F. PDIP)	Jayus (F.PAN)	Sasmito, SH (FPG)
KOMISI E	AS. Sukawijaya, SE (F. PD)	Mahmud Mahfudz (PKS)	Peni Dyah (F. PDIP)

Sumber : diolah dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 2010

Jumlah anggota komisi A sebanyak 16 orang, Komisi B berjumlah 18 orang, Komisi C ada 21 orang, Komisi D 20 orang anggota, dan Komisi E terdapat 20 orang anggota

2.5.4 Badan legislasi

Badan Legislasi adalah salah satu alat kelengkapan DPRD yang merupakan lembaga baru di DPRD Provinsi Jawa Tengah yang pada periode sebelumnya belum terbentuk. Badan Legislasi terdiri dari 21 anggota.

Menurut Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah BAB VII Pasal 62 Badan Legislasi memiliki tugas : (1) Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD, (2) Berkoordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah, (3) Menyiapkan rancangan peraturan daerah berdasarkan inisiatif DPRD serta program prioritas yang telah ditetapkan, (4) Melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan daerah yang diajukan anggota, komisi, dan atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD, (5) Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi, dan atau gabungan komisi, di luar priritas rancangan peraturan daerah

tahun berjalan atau diluar peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah, (6) Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi melalui koordinasi dengan komisi dan atau panitia khusus, (7) Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah, (8) Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Berikut susunan Pimpinan Badan legislasi DPRD Provinsi Jawa Tengah :

Ketua : Ir. H. Atyoso Mochtar, SS

Wakil Ketua : Zaenal Mahirin S.Sos

2.5.5. Badan Anggaran

Badan Anggaran DPRD merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD dengan anggota berjumlah 50 orang. Menurut Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah BAB VII Pasal 64 Badan Anggaran bertugas : (1) Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) paling lambat lima bulan sebelum ditetapkannya menjadi APBD, (2) Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara, (3) Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, (4) Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasar hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi, (5) Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah, (6) Memberikan sarana kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD. Susunan Pimpinan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah sesuai dengan susunan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah.

2.5.6. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang ditetapkan berdasar surat keputusan DPRD. Menurut Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah BAB VII Pasal 66 Badan Kehormatan DPRD memiliki tugas untuk :

- (1) Memantau dan mengevaluasi disiplin dan atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD,
- (2) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan atau kode etik DPRD,
- (3) Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan atau klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan atau masyarakat,
- (4) Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripurna

Jumlah anggota Badan kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah 7 orang berdasarkan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah. 7 orang tersebut diambil dari perwakilan masing-masing Fraksi yang ada di DPRD. Namun sesuai kesepakatan, fraksi yang perolehan suaranya terkecil tidak dapat mengirimkan wakilnya di Badan Kehormatan, yaitu Fraksi PPP dan Fraksi Hanuraku. Berikut Susunan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Ketua : Ir. MG. Nuniek Sri Yuningsih, MS

Wakil Ketua : Kamal Fauzi

2.5.7. Panitia Khusus

Menurut Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah BAB VII Pasal 72 Panitia khusus merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat ad hoc yang dibentuk dengan rapat paripurna. Jumlah keanggotaan Panitia Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD. Sejumlah Panitia Khusus telah dibentuk DPRD Provinsi Jawa Tengah seperti ; (1) Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, (2) Panitia Khusus Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir tahun 2009, (3) Panitia Khusus Penanaman Modal, (4) Panitia Khusus Pengelolaan Panas Bumi, (5) Panitia Khusus Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jateng tahun 2013, (6) Panitia Khusus Penyempurnaan Tata Tertib DPRD Jawa Tengah, (7) Panitia Khusus Panitia Kerja Hasil Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, (8) Panitia

Khusus Raperda tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, (9) Panitia Khusus Raperda tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ngargoyoso.

2.6. Masa Reses

Reses diadopsi dari kata *recess* (bhs. Belanda) yang berarti berlibur, istirahat atau turun main. Dalam makna asalnya kata reses dikenakan pada liburan sekolah (semacam liburan semester setelah ujian) dan liburan parlemen (*recess of parliament*). Jadi prinsipnya berlibur untuk melepas kepenatan dan rutinitas di tengah masa tugas.

Reses DPR/DPRD bermula dari kebiasaan orang-orang Belanda yang duduk di sebagai anggota *volksraad* (DPR) dan *regentschapsraad* (DPRD setingkat kabupaten/kota) pada masa Hindia Belanda, yang mengadaptasi liburan musim panas di negara asal yang beriklim subtropis. Saat itu reses dilakukan sekali untuk waktu sekitar tiga bulan dalam setahun²⁵.

Saat ini reses dimaknai sebagai kunjungan DPR/DPRD ke daerah untuk berlibur dan menyerap aspirasi masyarakat pemilih yang dilakukan 3 kali dalam setahun. Perubahan dari makna asal itu tidak soal. Muatan positifnya masa reses menjadi lebih bermanfaat sebab digunakan pula untuk menyerap aspirasi rakyat.

Masa Reses, sesuai dengan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 Pasal 74 adalah Masa Kegiatan para Anggota DPRD di luar Masa Sidang untuk melakukan pantauan di Daerah yang dilakukan Anggota DPRD secara perseorangan atau berkelompok di luar Gedung DPRD. Kegiatan Reses dipergunakan untuk bertemu, bertatap muka mengunjungi dan menyerap aspirasi

konstituen di daerah pemilihan masing-masing serta menyampaikan pesan-pesan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Reses dilaksanakan selama tiga kali dalam satu tahun persidangan. Pelaksanaan kegiatan reses adalah berlangsung selama enam hari. Masa Reses dipergunakan untuk anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Setelah pelaksanaan reses, anggota DPRD berkewajiban untuk membuat laporan reses.

Kewajiban anggota DPRD Provinsi untuk bertemu dengan konstituen dan daerah pemilihannya merupakan tanggungjawab moral dan politis yang diatur dalam UU No 27 tahun 2009 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 300 dan rumusan pasal tersebut diatur oleh peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2014.

Kegiatan pada masa reses ini dilakukan untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat dalam menjaring aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dalam pelaksanaannya komunikasi politik yang terjadi untuk menjaring aspirasi ini berupa tatap muka dan melakukan dialog, dan kunjungan ke lapangan.

Adapun Tujuan Reses anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menurut Tata Tertib Anggota DPR Provinsi Jawa Tengah 2009-2014 adalah untuk : (1) Memberikan informasi dan penjelasan berkaitan dengan hal-hal yang berkembang di dalam Masa Persidangan Kesatu tahun Sidang 2010, (2) Melaksanakan kewajiban Anggota DPRD dalam menyerap, menghimpun dan menampung

aspirasi masyarakat, (3) Memberikan informasi masalah regional yang berkembang di Provinsi Jawa Tengah, (4) Memberikan informasi tentang kebijakan dan kegiatan Partai.

2. 6.1. Persiapan Masa Reses.

Kegiatan reses adalah berdasarkan pertimbangan : (1) UU No. 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, (2) UU No. 27 tahun 2009 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (3) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Tata Cara Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah, (4) Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor I Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, (5) Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah No. 2 tahun 2005 tentang tata cara pelaksanaan reses DPRD Provinsi Jawa Tengah, (6) Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah : No. 161/745/2010 tanggal 4 Maret 2010, Surat No. 162.1/2449 tanggal : 12 Juli 2010, Surat No. 4 Tanggal November 2010 tentang Pelaksanaan Reses.

Penetapan dan jadwal masa reses DPRD Jawa Tengah dimulai dengan pembahasan di Badan Musyawarah tentang waktu pelaksanaan reses yang selanjutnya di sampaikan kepada Ketua DPRD. Selanjutnya Ketua DPRD mengirim surat kepada Ketua Fraksi perihal pelaksanaan masa reses. Surat

tersebut berisi waktu masa reses dan penugasan pelaksanaan reses kepada anggota Fraksi.

2.6.2 Fasilitas Reses yang Diterima Anggota DPRD

Setiap anggota DPRD diberikan fasilitas yang diwujudkan dalam bentuk uang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dimana masing-masing anggota dewan akan memperoleh; uang makan untuk peserta reses, uang penggandaan materi reses, dan uang sewa tempat, serta uang lunsum untuk anggota DPRD selama enam hari. Pada masa Reses tahun 2010, masa persidangan I, II, dan III, besarnya sama per periode.

Fasilitas tersebut adalah : (1) Uang konsumsi sebesar Rp. 37.000,- per peserta. Dengan jumlah peserta maksimal 300 orang untuk sekali masa reses, (2)Uang penggandaan materi reses sebesar Rp. 10.000,- per materi untuk setiap peserta, Dengan jumlah peserta maksimal 300 orang untuk sekali masa reses, (3) Uang sewa tempat Rp. 600.000,- dengan maksimal 3 tempat sewa, (4) Uang lunsum anggota Rp. 5.075.000,- untuk enam hari masa reses.

2.6.3. Persiapan Internal Fraksi

Sebelum melakukan reses, Fraksi mengadakan rapat internal untuk membahas persiapan dalam melaksanakan masa reses. Dalam rapat tersebut biasanya dilakukan pembahasan mengenai materi apa yang akan disampaikan pada saat reses.

Untuk materi reses, tidak semua fraksi menyeragamkan materi yang disampaikan. FPKS menyusun materi reses secara seragam, dan dicetak dalam bentuk buku. Dimana dalam buku tersebut termuat nama anggota DPRD dari FPKS serta materi masa reses.

Fraksi Partai Golkar memiliki model dimana fraksi memberikan gambaran materi yang harus disampaikan secara tertulis yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Fraksi yang berisi : (1) Nama anggota DPRD dan penugasan di Dapilnya, (2) Gambaran umum kebijakan fraksi, (3) Laporan hasil reses periode sebelumnya, kebijakan pemerintah Jawa Tengah, masalah aktual di Jawa Tengah, (4) Kegiatan Fraksi Partai Golkar dan DPD Partai Golkar Jawa Tengah, (5) Materi tersebut dicetak dan dibagikan kepada anggota DPRD Fraksi Partai Golkar untuk dibagikan kepada konstituen pada saat masa reses. Sedangkan fraksi-fraksi lain tidak melakukan hal tersebut. Materi reses hanya di susun secara pribadi tanpa koordinator Fraksi.

2.6.4 Penentuan Waktu, Lokasi, dan peserta Reses.

Penentuan Waktu, Lokasi, dan peserta Reses dilakukan oleh anggota DPRD secara individu melalui jaringan partai yang ada di daerah-daerah dan sebagian tokoh masyarakat yang menjadi tim sukses anggota DPRD saat kampanye pemilu legislatif 2009. Demikian juga dengan peserta reses yang ditentukan oleh pengurus partai di tingkat daerah. Tempat pelaksanaan reses sebagian besar dilakukan di kantor partai, dan rumah tokoh masyarakat.

2.6.5 Pelaksanaan Masa Reses

Dalam melaksanakan reses, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menggunakan dua metode, yakni pertemuan dengan konstituen dan kunjungan lapangan. Pertemuan dengan konstituen biasanya dilakukan dengan : (1) Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah, serta jajaran Eksekutif Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa, (2) Pimpinan dan Pengurus Partai Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan dan Pimpinan Desa/Kelurahan Partai, (3) Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai DPRD Kabupaten/Kota, (4) Pimpinan dan Anggota organisasi underbouw partai, (5) Serta tokoh-tokoh masyarakat dan konstituen.

Disamping mengadakan pertemuan-pertemuan dengan warga masyarakat terutama konstituen partai khususnya, kegiatan Reses juga dimanfaatkan untuk melakukan kunjungan lapangan yang dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan anggota DPRD terhadap realisasi pekerjaan yang mendapatkan alokasi bantuan dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan lokasi yang menjadi usulan dan aspirasi masyarakat untuk mendapatkan alokasi bantuan dari APBD Provinsi Provinsi Jawa Tengah.

2.6.6. Penyusunan Laporan Reses

Setelah melakukan kegiatan reses, setiap anggota DPRD berkewajiban untuk membuat laporan pelaksanaan reses. Laporan masa reses disusun secara tertulis yang selanjutnya di sampaikan kepada pimpinan DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota. Laporan masa reses berisi gambaran yang benar

dan akurat terhadap pelaksanaan masa reses serta persoalan atau temuan selama pelaksanaan reses, aspirasi masyarakat, kesimpulan, dan saran dari pelaksanaan masa reses

Laporan reses tersebut secara perseorangan lebih sebagai syarat administrasi keuangan yang disampaikan kepada Sekretariat Dewan. Laporan Reses secara individu tersebut juga dikumpulkan di fraksi masing-masing, yang selanjutnya di susun oleh fraksi untuk kemudian di paripurnakan.

2.6.7 Tindak lanjut hasil reses.

2.6.7.1 Sosialisasi Melalui Media Massa

Anggota DPRD yang melakukan reses ada yang berinisiatif untuk langsung mempublikasikan kegiatan resesnya kepada wartawan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dan masyarakat umum mengetahui akan persoalan dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat yang ditemukan pada saat pelaksanaan reses.

2.6.7.2 Tindak Lanjut Melalui Rapat Paripurna

Tindak lanjut hasil reses dapat tercermin melalui alat kelengkapan DPRD yang ada yakni, Pimpinan dewan, badan musyawarah, badan legislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan, maupun alat kelengkapan lainnya yang dibentuk melalui rapat paripurna. Dalam rapat paripurna selain dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, juga oleh kalangan eksekutif daerah.

Dalam rapat paripurna ini, masing-masing fraksi mengemukakan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, baik di sektor pembangunan

fisik maupun non fisik yang meliputi bidang infrastruktur, pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Aspirasi masyarakat yang disalurkan kepada anggota dewan nantinya akan direalisasikan ke Pemda. Tentunya tindak lanjut aspirasi ini tentunya harus sinergi dengan Pemda.

2.6.7.3 Tindak Lanjut Masa Reses Melalui Partai Politik.

Fraksi merupakan ujung tombak partai politik di DPRD, dengan demikian keberadaan fraksi sangatlah penting bagi partai politik. Kebijakan partai politik dapat diwujudkan dalam kebijakan fraksi yang kemudian dilanjutkan oleh anggota fraksi yang ada di alat kelengkapan DPRD.

Tindak lanjut hasil reses dapat dilakukan melalui fraksi tidak hanya dalam dalam penyusunan laporan reses yang disampaikan dalam sidang paripurna, namun juga disertai dengan langkah-langkah untuk merealisasikan aspirasi masyarakat yang dianggap penting oleh fraksi.

Temuan hasil reses tersebut selanjutnya diserahkan kepada pimpinan partai politik dimana anggota DPRD tersebut berada. Biasanya hasil reses yang ada akan dijadikan sebagai bahan program kerja partai untuk membina konstituen masing-masing partai politik tersebut.

2.6.7.4 Tindak Lanjut Melalui Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merespon apa yang di temukan pada saat reses. Kemudian pemerintah daerah menganggarkan temuan reses dalam bentuk bantuan sosial yang berupa infrastruktur, permodalan, dan alat kelengkapan usaha.

2.7. Gaya Komunikasi Pimpinan Dewan

Gaya komunikasi adalah suatu kekhasan yang dimiliki setiap orang dan gaya komunikasi antara orang yang satu dengan yang lain berbeda. Bagaimana isi pesan yang akan di sampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat di mengerti dan di pahami oleh konstituennya di daerah, dan bagaimana penjelasan atau komunikasi itu tidak terkesan membosankan maka harus ditunjang oleh gaya komunikasi yang memadai.

Begitu Pula dengan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki gaya komunikasi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan antara gaya komunikasi antara satu orang dengan yang lain dapat berupa perbedaan dalam ciri-ciri model dalam berkomunikasi, tata cara berkomunikasi, cara berekspresi dalam berkomunikasi dan tanggapan yang diberikan atau ditunjukkan pada saat berkomunikasi.

Dalam setiap kegiatan reses, pimpinan DPRD Jateng terlebih dahulu menyiapkan teknis kegiatan reses yang akan dilakukan. Persiapan terdiri dari kegiatan pembuatan materi apa yang akan disampaikan pada saat reses. Biasanya materi ini dibuat oleh staf pribadi ataupun staf ahli pimpinan dewan yang bersangkutan.

Dari lima pimpinan dewan yang ada, Murdoko, Bambang Priyoko, dan Riza Kurniawan, materi resesnya hanya berisi makalah tentang isu yang sedang aktual. Sedangkan Bambang Sadono dan Fikri Faqih materi resesnya lebih komprehensif yang terdiri perkembangan situasi pembangunan yang ada di Jawa Tengah 4 bulan terakhir, hasil pelaksanaan reses, kinerja apa yang sudah

dilakukan oleh pimpinan dewan yang bersangkutan, agenda partai politik dimana pimpinan dewan tersebut berasal.

Walaupun materi reses tersebut digandakan dan dibagikan pada konstituen, namun pada kenyataannya saat reses, tidak semua materi reses yang telah dibuat tersebut dibacakan oleh pimpinan dewan. Pimpinan hanya menjelaskan secara implisit dari materi yang sudah ada dan lebih menjelaskan kepada materi lainnya tergantung dari keinginan pimpinan dewan yang bersangkutan,

Tahap persiapan selanjutnya adalah penentuan jadwal reses baik mulai dari penentuan lokasi, dan acara, waktu. Dalam tahap ini, pimpinan dewan ataupun staf pribadi berkoordinasi dengan struktur partai yang ada di daerah untuk membuat sebuah kegiatan yang berupa temu kader ataupun peninjau ke lapangan.

Struktur di daerah inilah yang berperan penting dalam mempersiapkan secara teknis pelaksanaan kegiatan reses mulai dari lokasi kegiatan, apakah di balai desa, rumah penduduk, atau pondok pesantren. Kemudian kegiatan reses itu akankah dilaksanakan dalam forum formal atau informal, makanan yang disediakan, dan yang lebih penting mengorganisir peserta reses. Sebagai langkah penghematan, pelaksanaan kegiatan reses bisa dilakukan di sekolah, pondok pesantren, atau rumah konstituen sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya sewa tempat acara. Hal ini dilakukan oleh Bambang Sadono.

Sedangkan yang lainnya, melakukan kegiatan reses banyak di kantor partai daerah atau rumah kader yang di fungsikan sebagai sekretariat partai. Hal ini

dilakukan karena mereka masih menduduki struktur partai. Namun cara lain juga dilakukan oleh Fikri Faqih yang menggandeng *counter part* nya di daerah, seperti kantor bupati Tegal.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang tidak mengatur tentang pemberian uang transportasi bagi peserta reses, maka pimpinan dewan melakukan manajemen sedemikian rupa agar kegiatan reses itu sukses. Bagi pimpinan dewan yang “nomboki” uang transport, mendatangkan peserta reses tentu lebih mudah dibandingkan dengan pimpinan dewan yang tidak memberikan uang transport.

Memang tidak ada batasan yang mengatur tentang pemberian uang kepada konstituen. Namun, sebagian dari pimpinan dewan memandang perlu untuk tetap memberikan uang transportasi kepada konstituennya. Ada dua cara dalam memberikan uang transportasi bagi konstituen. Ada yang diberikan di depan pada saat peserta reses mengisi daftar hadir yang telah disediakan, dan ada pula yang menyerahkannya pada saat acara reses tersebut selesai. Yang terakhir ini dilakukan oleh Murdoko dengan alasan jika di berikan di saat mereka mengisi daftar absen, ditakutkan peserta reses yang telah menerima dana transportasi tersebut tidak mengikut acara sampai selesai. Memang pemberian dana transportasi ini biasa dilakukan jika yang datang dalam acara reses tersebut adalah kalangan masyarakat umum, bukan kader partai atau konstituen murni.

Menurut Kode Etik DPRD Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2009-2014, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan reses adalah 300 orang. Maka dari itu, struktur partai ini memegang peranan penting untuk mengumpulkan orang

sebanyak jumlah tersebut. Selanjutnya, pada saat pelaksanaan kegiatan reses. Secara umum kegiatan reses terbagi menjadi dua bentuk, yaitu temu kader dan peninjauan lapangan. Yang pertama, bentuk temu kader. Dalam kegiatan ini, pimpinan dewan mendatangi lokasi yang telah disiapkan sebelumnya.

Tidak berbeda dengan acara pertemuan yang lainnya. Dalam kegiatan reses, acara di mulai dari pembukaan, sambutan-sambutan, hingga acara inti yakni penyampaian materi reses yang dilakukan oleh pimpinan dewan yang bersangkutan, dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab antara konstituen dan pimpinan dewan yang bersangkutan. Penyampaian ini durasinya sangat singkat sekitar 20-40 menit setiap kali pertemuan. Lama durasi tersebut agak berbeda ketika reses itu dilakukan secara bersama-sama dengan anggota DPRD kabupaten/kota.

Hal berbeda dilakukan ketika pada saat reses yang dilakukan pimpinan dewan berbarengan dengan agenda Pilkada di daerah pemilihannya tersebut. Durasi penyampaian materi reses akan lebih banyak berisi tentang kesiapan partai menghadapi pilkada ataupun malah materi reses semuanya adalah konsolidasi partai.

Namun dalam penyampaian materi reses ini, Riza Kurniawan dan Murdoko menyampaikan materi resesnya lebih pendek durasinya dari ketiga pimpinan dewan yang lain. Setelah penyampaian materi, dilanjutkan sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini, konstituen menyampaikan aspirasinya yang paling banyak mengenai masalah pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi). Singkatnya waktu penyampaian materi reses juga merupakan harapan

bagi peserta reses untuk lebih banyak waktu yang ada untuk berdialog dengan pimpinan dewan.

Kegiatan reses berikutnya adalah peninjauan ke lapangan. Sama seperti dengan acara pertemuan, kegiatan kunjungan ke lapangan juga di prakarsai oleh struktur partai di daerah. Merekalah yang menentukan lokasi mana yang pantas untuk dikunjungi pada saat reses tersebut. Ada yang mengusulkan perbaikan jalan, jembatan, sekolah, ataupun tempat ibadah.

Pimpinan dewan, tak jarang harus bersusah payah untuk menuju tempat yang akan di kunjungi tersebut. Fikri Faqih misalnya, harus rela naik motor di tengah terik matahari untuk meninjau desa tersolir yang jaraknya 10 km lebih dari pusat kota Brebes. Berbeda dengan acara temu kader, dalam kunjungan ke lapangan dilaksanakan sendiri-sendiri oleh pimpinan dewan bersangkutan.

Acara kunjungan ke lapangan ini dilakukan untuk mengetahui pekerjaan pembangunan objek kunjungan yang telah mendapatkan dana bantuan sosial dan juga untuk melihat lokasi usulan yang akan menerima dana bantuan sosial. Sehingga dengan demikian tidak ada penyalahgunaan dana bantuan sosial yang telah diberikan.

Dalam pelaksanaan masa reses dengan batasan waktu yang hanya enam hari ini, tidak semua pimpinan dewan memanfaatkan secara penuh kegiatan tersebut selama enam hari. Hanya Bambang Sadono dan Fikri Faqih menggunakan waktu enam hari itu secara maksimal. Yang lain melakukan pemadatan acara sehingga waktu yang dibutuhkan hanya tiga sampai empat hari

saja. Bahkan dalam reses periode ketiga bulan November 2010, Bambang Priyoko tidak melaksanakan reses karena yang bersangkutan melaksanakan ibadah haji.

2.8. Profil Pimpinan DPRD Prov. Jateng

2.8.1. H. Murdoko, SH²⁶

Jika Amerika punya Keluarga Kennedy yang memiliki sejumlah anak yang menjadi politisi terkemuka, seperti John F. Kennedy²⁷, Bob Kennedy²⁸, dan Teddy Kennedy²⁹, di Jateng juga akan ada keluarga R. Sugito Wiryo Hamidjoyo. Dari keluarga asal Cangkiran, Mijen Semarang tersebut, muncul sejumlah politisi terkemuka, salah satunya, Si Bungsu, Murdoko SH, yang saat ini menjabat Ketua DPRD Jateng,

Dari tujuh anak pasangan R. Sugito dan Rr. Rustiawati yang masih hidup, ada lima orang yang berkiprah di dunia politik, dan cukup sukses dalam kariernya. Putra tertua, Pupung Suharis pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, adiknya, Don Murdono saat ini masih menjabat sebagai Bupati Sumedang untuk periode kedua. Adiknya lagi, Hendy Boedoro, pernah dua periode menjabat sebagai Bupati Kendal. Walaupun akhirnya diberhentikan dari jabatannya karena tersangkut kasus, namun toh dukungan dan simpati masyarakat kepadanya masih cukup besar. Terbukti, istrinya, Widya Kandi Susanti sekarang sebagai Bupati Kendal.

Putra pasangan R. Sugito dan Rr. Rustiawati selanjutnya yang berkiprah dalam dunia politik adalah Yuwanto, yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Semarang. Sementara Murdoko, Si Sulung dari keluarga besar ini

juga cukup sukses dalam perjalanan politiknya. Selain menduduki posisi Ketua DPD PDIP Jateng, dia juga menduduki posisi Ketua DPRD Jawa Tengah periode yang kedua. Dari ketujuh bersaudara ini, hanya Bariyanto dan Alan Dony Mudianto yang memilih untuk berkarir di perusahaan asing.

Dengan berbagai prestasi dan posisi penting yang saat ini dipegang oleh anak-anak Sugito, maka tidak mengherankan, Poros Cangkiran, begitu biasa orang menyebut, menjadi salah satu poros kekuatan yang sangat diperhitungkan dalam peta politik di Jawa Tengah. Apalagi, walaupun sudah berpencar di berbagai daerah, trah Raden Sugito tetap menjadikan “Rumah Wasiat” peninggalan orang tuanya di depan terminal Cangkiran, sebagai pusat pergerakan politik.

Keluarga besarnya selalu bertemu setiap bulan, untuk saling memberikan masukan serta kritikan antara satu dengan yang lainnya. Menurut Murdoko, bergabungnya sejumlah keluarganya dalam dunia politik memang bukan kebetulan. Darah politik mengalir ayahnya, yang pernah menjabat sebagai Sekretaris PNI Kendal. Walaupun begitu, Sugito tidak pernah mengarahkan anaknya bergabung di PNI, namun mempersilahkan mereka memilih jalan hidup masing-masing, termasuk pilihan partai.

Sebenarnya, mereka tidak secara langsung diberi pelajaran dan pengetahuan politik oleh R. Sugito. Namun, mereka lebih sering melihat secara langsung menyaksikan kegiatan ayahnya yang akrab dengan pengerahan massa. Menurut Murdoko, ayahnya selalu menekankan supaya dia dan kakak-kakaknya punya sikap yang gigih. Itulah yang menjadikan mereka tidak gentar, saat masa orde baru mendapatkan tekanan dari penguasa.

Karir Politik Melesat

Seandainya Musium Rekor Indonesia (Muri) milik bos jamu Jaya Suprana mempunyai kategori rekor karier politik tercepat, mungkin Murdoko yang layak untuk dimasukkan pertama kali. Betapa tidak. Dari awal karier politiknya sebagai ketua PDI-Perjuangan ranting desa Cangkiran, Mijen, ia langsung melejit menjadi ketua DPD PDI-perjuangan Jateng. Bahkan tak lama kemudian, mantan anggota Resimen Mahasiswa (MENWA) UNDIP ini dipercaya untuk menduduki jabatan ketua DPRD Jateng untuk periode kedua.

Dalam menduduki jabatannya, banyak hal baru yang terlihat dari sosok *low profil* yang sering bicara ceplas-ceplos tersebut. Terutama masalah penampilan. Jika dulunya sosok Murdoko selalu menggunakan kemeja atau bahkan kaos santai, maka saat ini dirinya harus beradaptasi dengan lingkungan barunya. Saat datang ke Gedung Berlian, Duku mau tak mau harus menggunakan baju resmi.

Walaupun begitu, gayanya yang santai dan *cool* tetap tidak juga berubah. Tak jarang, ditengah keseriusan memimpin rapat Paripurna DPRD Jateng, dia mengeluarkan *celotehan* yang acapkali membuat anggota *ger-geran*. Sehingga, rapat yang tadinya berlangsung tegang, berubah menjadi cair.

Menghirup Udara Perjuangan

Muda, kalem, pintar dan bijaksana. Itulah gambaran sepintas kepribadian orang nomor satu di PDI Perjuangan H Murdoko SH. Tokoh yang lahir di Semarang, 6 Maret 1963 ini merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara dari pasangan R.Sugito Wiryo Hamidjoyo dengan Ny.R.Rustiawati. Walaupun kedua orang tuanya masih

memiliki garis keturunan Kasultanan Yogyakarta, namun ia tidak memakai gelar Raden di depan namanya.

Setelah menamatkan pendidikan SLTA, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Undip. Murdoko kecil tumbuh dan berkembang dalam keluarga nasionalis sejati yang sangat paham dengan pemikiran kebangsaan. Sebab ayahnya adalah aktivis dengan ideologi nasionalis yang sangat kental.

Di daulat memimpin PDIP Jateng, 6 bulan sebelum digelar pemilu legislatif 2004 tidak membuatnya kendor. Duku justru mengaku lebih tertantang dan segera menyiapkan berbagai gebrakan. Ditengah konflik internal yang melanda, dia mengaktifkan konsolidasi di semua tingkatan, dari tingkat DPD sampai tingkat Ranting. Hasilnyapun tidak mengecewakan. Dia berhasil mempertahankan Jateng sebagai basisnya banteng mencereng, dengan mendptakan suara terbanyak yaitu 5.262.749 suara dari 17.644.333 total suara sah. Dalam pemilu saat itu, Jateng menjadi satu-satunya provinsi yang bisa dimenangkan PDI Perjuangan. Kesuksesan tersebut kembali terulang dalam 2009 lalu. Walaupun mengalami penurunan suara sebagaimana parpol-parpol besar yang lain, Duku tetap bisa menghantarkan PDIP sebagai partai nomor wahid di Jateng.

Ayah dari Nataya Kenedisa yang yang gemar motorcros, *speedroad* sampai *offroad* tersebut telah menunjukkan kepiawaiannya dalam memimpin ”partai banteng mencereng” di Jateng. Walaupun terjadi penurunan jumlah suara dalam Pemilu 2009 lalu, PDIP tetap bisa menjadi pemenang di Jateng.

Dalam mengemban amanah sebagai Ketua DPRD Jateng periode kedua, Duku mengaku akan berusaha untuk memperbaiki citra buruk dewan merupakan tanggungjawab seluruh anggota. Menurutnya, upaya ini merupakan kewajiban semua anggota dewan, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antar seluruh elemen dewan.

Menurutnya, *image* buruk yang muncul pada anggota dewan lama lebih karena dalam pengambilan kebijakan terutama dalam penentuan APBD hanya berdasarkan aturan perundang-undangan. Artinya, jika ada aturannya, ya dilaksanakan. Menurutnya, hal tersebut tidak salah, namun bisa jadi tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menurutnya mulai sekarang, pengambilan keputusan dewan akan lebih melihat pada aspek etika atau kepatutan sosial. Kami akan menampung dan menjalankan apa yang diinginkan oleh rakyat, siap menerima saran, masukan serta kritikan dari berbagai elemen. Sehingga nantinya keputusan keputusan yang diambil dewan akan populis dimata rakyat. Namanya saja wakil rakyat, maka kita harus menjalankan apa yang diinginkan oleh rakyat.

2.8.2. Bambang Priyoko SIP³⁰

Bambang Priyoko menghuni gedung ‘Berlian’ DPRD Jawa Tengah periode 2009-2014 beraasal Partai Demokrat nomor urut 1 di dapil 3 (Pati, Rembang, Blora dan Grobogan), meraih 84.729 suara. Perolehan suara tersebut tertinggi di Partai Demokrat untuk caleg DPRD Jawa Tengah.

Ia bersyukur, mendapat amanah suara sebanyak itu, sebagai konsekuensinya, ia harus berusaha konsekuen melaksanakan amanah tersebut sebaik-baiknya. Bagi Bambang Priyoko, masuk dalam kancah politik praktis masih terhitung baru, diawali tahun 2006 hingga sekarang sebagai Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jateng, setelah memasuki pensiun sebagai prajurit Kodam IV/Diponegoro dengan pangkat terakhir kolonel.

Bambang Priyoko juga baru kali pertama menjadi anggota DPRD yang ditempatkan di dapil 3 Jateng, yang komunitas masyarakatnya saat itu belum dikenal secara baik. Ibaratnya harus mencari dukungan sebanyak mungkin di ‘hutan rimba’, maka strategi kampanye yang digunakan lebih mengedepankan pendekatan etika bermasyarakat.

Ia menyadari, masyarakat dapil 3 sebagian besar belum mengenalnya, maka kepada konstituen ia lebih banyak memperkenalkan diri, asli Purworejo, pensiunan TNI AD, ditugaskan partai menjadi caleg di dapil 3, mohon doa restu dan dukungan. Bambang tidak perlu bicara tentang wacana yang berat-berat, rakyat malah tidak paham.

Namun, setiap mendatangi pemilih, kata Bambang Priyoko, suami dari Diah Aggraeni SH MM, yang menjabat Sekjen Depdagri ini, tentu tidak sekadar perkenalan saja. Ada tuntunan agama yang dipegang teguh keluarganya. Di dapil tersebut secara ikhlas lahir batin Bambang Priyoko memperbanyak bantuan bagi kepentingan tempat ibadah, menyantuni yatim piatu serta memperhatikan kegiatan olahraga para remaja seperti membantu fasilitas bola voli, dan lain-lain. Sehingga

pendekatan tersebut diterima masyarakat di dapil 3, sehingga di dapil tersebut perolehan suara saya terbanyak kedua setelah Pak Bambang Sadono dari Golkar.

Bambang Priyoko juga meyakini secara umum, terdongkraknya suara Partai Demokrat pada Pileg 2009 yang mencapai 292.543 suara yang menghasilkan dua kursi untuk DPRD Jateng, atau naik 100 persen lebih, selain kerja keras para caleg juga faktor pesona Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pesona program pemerintah yang dipimpin SBY juga keberhasilan *finishing touch* dalam menguatkan pilihan.

Memulai Karir

Bambang Priyoko memulai tugas militernya setelah lulus Akabari Angkatan Darat tahun 1972. Putra kedua dari H. Toyib Parto Sudarmo dan Hj.Siti Rukayah ini punya dedikasi dan prestasi yang cukup bagus. Maka selama berkarir di dunia militer Wakil Ketua Pengda PSSI ini Jateng ini mendapat enam penghargaan, yaitu Satya Lencana Santi Dharma, Satya lencana Seroja, Satya Lencana Bhakti, Satya lencana Kesetiaan 8, 16, 24 tahun, Satya Lencana Veteran PKRI, dan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya.

Bambang juga pernah ikut dalam kontingen perdamaian PBB yang diberangkatkan ke luar negeri, seperti Tim Garuda VIII/UNEF di Mesir³¹, Operasi Elang Mandau di Kalimantan Tengah, Operasi Seroja di Timur-Timur³², dan menjadi personel Ofc. Bakin di Taiwan.

Meski terbiasa berada di lingkungan militer yang disiplin dan berwibawa, tidak merubah sosok Bambang yang lembut dan rendah hati dengan siapa saja yang ditemui. Kepribadian pria kelahiran 29 September 1948 ini banyak

dipengaruhi oleh didikan sang ayah yang seorang militer dan ibu yang menjadi guru di SMP Muhammadiyah Purworejo. Ajaran dari orang tuanya inilah yang membuat Bambang senantiasa peduli dengan lingkungannya. Hal ini terbukti atas prakarsanya, telah berdiri Masjid Istiqomah di lingkungan tempat tinggalnya. Berkat kesabaran dan ketekunannya menjadi takmir masjid selama 12 tahun, kini masjid tersebut dikembangkan menjadi masjid megah ber AC dan tak pernah sepi dari warga yang menunaikan ibadah.

Kegemarannya bergaul dan bermasyarakat menjadi sisi lain dari kehidupan Bambang Priyoko. Di rumahnya, ia tergolong aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, mulai dari pertemuan rutin, kerja bhakti, perayaan hari besar keagamaan maupun nasional. Maka tak mengherankan ketika warga mendaulatnya sebagai ketua RW selama 10 tahun.

Kebiasaan Bambang bergaul dengan siapa saja menjadikannya lebih dikenal sebagai sang pamamong. Demikian juga di Partai Demokrat Jawa Tengah, bapak dari Mayor Inf. Wahyu Yudhoyono, dr Setyo Dipoyono, dan Dewi Sartika ini sering dijadikan tempat untuk bertanya dan pertimbangan.

2.8.3. Bambang Sadono³³

Wayang, bagi sebagian besar orang, boleh jadi hanyalah kesenian tradisional yang sudah untung jika masih bisa menghibur masyarakat. Bagi Dr. H Bambang Sadono SH MH. Dia justru bisa memanfaatkan kesenian wayang untuk melakukan komunikasi politik. Yang lebih hebat lagi, pertunjukan wayang itu

mampu memecahkan beberapa rekor MURI, seperti rekor lamanya pergelaran wayang, rekor menonton, dan lainnya.

Berkat wayang pula, Bambang semakin mengukuhkan diri sebagai inovator, kreator sekaligus katalisator bagi pelestarian budaya Jawa. Maklum saja, ia mampu menggelar wayang selama 35 hari berturut-turut di 35 kabupaten/kota se-Jateng sejak 10 November sampai 14 Desember 2006. Dia bahkan menonton semua pergelaran wayang itu.

Atas kreativitasnya menggelar pertunjukan wayang sebagai media komunikasi politik untuk menyosialisasikan misi dan program Partai Golkar di Jawa Tengah, Wapres Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar waktu itu tak urung mengapresiasi. Kalla menyempatkan diri terbang ke Semarang untuk menonton wayang.

Bambang Sadono dikenal sebagai pekerja keras yang serba bisa, yang juga dikenal pandai menyiasati berbagai masalah, situasi, dan kondisi. Putra Blora ini rela meninggalkan status pegawai negerinya di Tegal (1978) dan hijrah ke Semarang untuk menjadi wartawan, sekaligus melanjutkan studinya di Undip. Menjelang tahun 1997, mantan Sekjen PWI Pusat ini hijrah ke Jakarta seiring terpilihnya dia menjadi anggota DPR-RI.

Ia dilahirkan di Dukuh Jambangan, Tunjungan, Blora Bambang Sadono dilahirkan, tepatnya tanggal 30 Januari 1957. Bambang Sadono dikenal sebagai penyair. Baru kemudian, sebelum menjadi wartawan Harian Suara Merdeka, ia menjelajah ke jenis-jenis tulisan lain, seperti cerita pendek (cerpen), esei, feature, dan reportase.

Dalam menjalani hidup, dia selalu merencanakannya dengan cermat. Beristrikan Hj. Restu Lanjari, MPd, Bambang Sadono di karuniai Empat anak, Lintang Ratri Rahmiaji, Padmasari Mestika Jati, Ratya Kirana Sadono dan Raja Sadono.

Pada tahun 1978, Bambang Sadono masuk Fakultas Hukum UNDIP Semarang dan diselesaikan tahun 1983. Selama kuliah Bambang Sadono juga menjadi wartawan, loper koran dan Guru SMP.

Bambang Sadono juga pernah kuliah di Fakultas Sastra IKIP Negeri Semarang, Fakultas Sastra Inggris UNDIP, dan Universitas Terbuka walaupun tidak sampai selesai. Kemudian melanjutkan ke S2 pada Fakultas yang sama di Universitas Indonesia dan tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor di UNDIP sejak tahun 1996 dan lulus pada tahun 2009. Tahun 1995 Bambang Sadono tercatat sebagai peserta termuda dalam Kursus Reguler LEMHANAS.

Bambang Sadono seorang pekerja keras. Bergelut selama 30 tahun dalam bidang Jurnalistik menjadikannya berhasil meraih posisi puncak. Selain sebagai Wakil pemimpin Redaksi Suara Merdeka, Pemimpin Redaksi Harian Suara Karya. Ketua PWI Jawa Tengah 1992- 1996 dan 1996-2000 dan Sekjen PWI Pusat periode 1998-2003.

Setelah aktif di KNPI, ia terjun ke dunia politik melalui Partai Golkar. Sejak tahun 1997 Bambang Sadono menjadi anggota DPR-RI. Desember 2004 terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah secara aklamasi.

Ketika duduk di Komisi I DPR RI tahun 1999-2004, Bambang Sadono sangat berperan sebagai pencetus ide UU Pers³⁴ dan UU Penyiaran³⁵. Di Komisi

tersebut ia cukup menonjol karena penguasaannya yang cukup tinggi untuk bidang pers.

Sebagai wakil rakyat, Bambang termasuk figur yang sangat menguasai daerah yang diwakilinya. Anggota Fraksi Golkar yang mewakili Blora, Grobogan, Rembang, dan Pati ini cukup rajin mengunjungi daerah pemilihannya itu, misalnya dengan melakukan kerjasama dengan bupati, lurah dan camat yang ada di daerah tersebut.

Bambang Sadono adalah sosok yang cerdas dan kaya ide. Pria yang aktif menulis sejak 1975 ini pernah tercatat sebagai wartawan yang paling produktif di Suara Merdeka, sehingga karirnya cepat menanjak.

Saat ini Bambang Sadono aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti Penasehat Puskud Jateng, Penasehat DPD Pemuda Tani Jateng, Penasehat Guru Bantu Indonesia, Wakil Ketua DPP Ikatan Alumni Undip, Ketua Umum Ikatan Penulis Keluarga Berencana Pusat.

2.8.4. Drs. H Abdul Fikri Faqih, MM³⁶

Tidak banyak orang tahu kalau sosok Drs. H Abdul Fikri Faqih, MM atau lebih akrab dipanggil ustadz Fikri, yang terlahir di Tegal pada 17 Juli 1963, ternyata mantan pegawai negeri sipil (PNS). Sebelum terjun di dunia politik, ia bekerja sebagai guru negeri yang diperbantukan di STM Muhammadiyah Tegal. Prestasi demi prestasi pun telah diraihny bahkan boleh dibilang sangat cemerlang dan sukses di dunia pendidikan. Setidaknya penobatan sebagai guru Teladan III tingkat SLTA dari kantor Depdikbud Kota Tegal telah disandangnya tahun 1998.

Selain itu, di tempat dia mengajar juga diberi kepercayaan oleh yayasan yang menaunginya sebagai kepala sekolah.

Namun kenangan indah sebagai guru PNS yang pernah dilakoni selama 11 tahun kini telah dia tinggalkan sejak keluarnya PP No 5 Tahun 1999 Tentang PNS yang menjadi Anggota Parpol dan PP 12 Tahun 1999. Menurut ketentuan PP tersebut, PNS yang menjadi anggota Parpol diberi waktu 1 tahun kalau tidak kembali maka diberhentikan dengan hormat. Maka Fikri memutuskan tetap istiqomah di partai dan merelakan tidak mendapatkan hak pensiun karena masa kerja baru 11 tahun dan umurnya waktu itu masih 36 tahun. Menurut ketentuan pensiun dapat diberikan ketika salah satunya sudah berumur 50 tahun atau masa kerja lebih dari 20 tahun.

Kini dunia politik sudah menjadi pilihan hidup bagi ustadz Fikri bahkan bisa dikatakan melekat pada dirinya. Jabatan puncak di partai berlogo padi yang diapit bulan sabit telah dia raih. Perhelatan suksesi pemilihan pimpinan tertinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tingkat Jawa Tengah yang dikemas dalam bentuk Muswil II yang berlangsung di Semarang pada Minggu, 10 Oktober 2010 telah mengantarkan ustadz Fikri menduduki ketua Umum DPW PKS periode 2010-2015.

Pada umumnya pemilihan ketua partai sedari awal hingga berakhir selalu diselimuti percekocokan bahkan perpecahan. Namun bagi PKS tidaklah berlaku demikian. Proses pemilihan melibatkan 1.456 kader inti yang mewakili kabupaten / kota di wilayah Jawa Tengah. Mereka mengajukan 32 calon ke DPP PKS untuk dinilai secara administratif menjadi 24 kemudian kader inti kembali

memilih 8 calon di kantor DPD masing-masing secara tertutup dan hasilnya dikirim oleh panitia tingkat wilayah kepada DPP PKS. Di PKS, untuk memilih ketua memang menjadi otoritas DPP. Itulah mekanisme pemilihan yang ada di PKS yang begitu demokratis dan menyejukkan. Sebelumnya ia menjabat sebagai Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jawa Tengah 2006 hingga 2010.

Dibesarkan di lingkungan pondok pesantren

Menjadi nahkoda partai yang dikenal religius seperti PKS tidaklah mudah. Setidaknya sebagai ketua umum PKS selayaknya memiliki dasar yang kuat dan mengakar tentang pemahaman agama Islam. Beruntung ustadz Fikri sejak kecil memang dididik dan ditopang oleh lingkungan maupun keluarga yang sangat kuat agamanya. Orang tuanya yang bernama Abdullah Faqih adalah alumni pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, yang lebih dari 20 tahun menimba ilmu di sana. Beliau telah berhasil menanamkan nilai-nilai agama, akhlaq, aqidah, ketakwaan, maupun syariat Islam pada diri ustadz Fikri kecil.

Belum lagi peran kiai Said Sholeh, *Mbah* dari Ibu yang merupakan salah satu alumni pondok pesantren Kremes dan Lirboyo, juga sangat berjasa membimbing dan memberikan ilmu *nahwu sharaf* ketika ustadz Fikri masih anak-anak. Tak ketinggalan KH Abdul Rauf, *Mbah* dari bapak juga ikut berjasa mempertebal ilmu agama ustadz Fikri melalui pondok pesantrennya yang bernama Ar-Rauf. Ia merasa beruntung hidup di lingkungan yang berdiri pondok-pondok pesantren dan keluarga besar yang sangat agamis. Awal belajar mengaji alif ba ta hingga mempelajari kitab-kitab *Kuning* seperti Jurmiah maupun Safinah dari kiai

Yusuf Sholeh, yang merupakan kakak dari kiai Said Sholeh. Kemudian *ngaji* lagi dengan KH Abdul Rauf, kiai Said, dan KH Hasbulah yang kesemuanya tinggal saling berdekatan dengan rumah orangtuanya.

Sebenarnya ustadz Fikri semenjak umur 11 tahun ingin menimba ilmu agama lebih dalam lagi di pondok pesantren Tebu Ireng Jombang mengikuti jejak sang ayah. Saat itu dia duduk di kelas 5 SD I Slawi dan hasrat *mondok* sangat kuat namun karena sang ibu Muniroh, yang sehari-hari sebagai guru PGA Slawi, melarangnya akhirnya niat itu diurungkan.

Selepas lulus SMP I Slawi tahun 1975 dia meneruskan sekolah di SMAN I Slawi. Untuk menambah keahlian di bidang bahasa Inggris dia mengikuti kursus di lembaga pendidikan *Extension English Course* di Slawi mulai dari tingkat *elementary* hingga *intermediate*, tahun 1979 -1982. Di tengah-tengah kesibukan antara sekolah dan kursus dia masih sempat meluangkan waktu untuk menambah wawasan yakni berorganisasi di PII (Pelajar Islam Indonesia). Kelas 3 SMP ia sudah menjadi ketua komisariat kecamatan Slawi kemudian kelas 2 SMA pengurus PII Kab/Kota Tegal. Saat itu belum ada ormas Islam yang bermunculan baru ada remaja masjid dan PII, itupun sisa-sisa orde lama. Fikri juga tercatat bergabung di organisasi PII tingkat Jateng mulai tahun 1983-1986.

Gagal jadi dokter

Ustadz Fikri memang sosok orang yang selalu ingin belajar dan belajar. Setelah lulus dari SMAN I Slawi tahun 1982, dia mencoba ikut tes masuk perguruan tinggi melalui tes perintis. Ada perintis I rumpun UGM - UI, perintis II rumpun IPB, perintis III rumpun Unsud – UNS, dan perintis IV rumpun IKIP. Dia sejak

masih duduk di bangku SMAN memang bercita-cita ingin menjadi ahli teknik listrik. Maka perintis IV pun dipilih dan akhirnya dia diterima di IKIP Semarang dengan peringkat ke 2 namun mahasiswa yang menduduki peringkat I mengundurkan diri sehingga dirinya menempati peringkat I. Pada saat yang sama dia mencoba ikut tes perintis III UNS dan diterima di fakultas kedokteran.

Ngambek kuliah

Kebahagiaan yang dirasakan ustadz Fikri memang sangat wajar dan patut diberi dukungan. Pasalnya, dia nyaris tidak bisa menyangang gelar kesarjanaannya dari IKIP Semarang gara-gara *ngambek* tidak mau mengikuti kuliah lagi. Kenapa dia *mutung* hingga hampir saja drop out? Pada tahun 1986 ketika dia hampir lulus dan telah mengikuti ujian *kolokium* pada saat bersamaan terjadi masa transisi dari elektronika biasa menuju elektronika digital sehingga ada satu mata kuliah tambahan. Karena ini menjadi kewajiban bagi semua mahasiswa maka proses kuliah dia lakoni dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan hingga ujian berlangsung

Namun nampaknya usaha itu tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Dia merasa kecewa berat ketika didapatinya mata kuliah tambahan tersebut nilainya E sementara teman-teman yang mencontek pekerjaannya malah mendapat nilai bagus.

Di sana dia mengabdikan diri di sekolah Aliyah Al Iman Adiwerna dan SMA Muhammadiyah Tegal. Dengan ilmu yang dia kuasai pihak sekolah mempercayakan 3 mata pelajaran sekaligus, fisika, menggambar mistar, dan bahasa Inggris padahal ilmu yang dia dapatkan di bangku kuliah adalah

kelistrikan. Hari demi hari dan bulan demi bulan telah dilaluinya hingga tak terasa ternyata hampir satu tahun pekerjaan sebagai guru telah dijalani dengan penuh suka cita. "Saya benar-benar enjoy dan jiwa saya sudah merasa cocok jadi Umar Bakri alias guru. Fikri yang kini bertempat tinggal di Jl. Mahakam No.6 RT 10/RW 04 kelurahan Slawi Wetan kec Slawi, Tegal, bersama istri tercintanya Zubaedah dan 7 anak kesayanganya Abdu Robbih El Kayyis Fikri, M Ashim Adz-Dzorif Fikri, Miqdad Abdul Aziz Adz-Dzakiy Fikri, M Kholik Labieb Fikri, Sumaya Ahida Fikri, Afifa Thohiro Fikri, dan Urwah Dzakiy Umam Fikri.

Tepat pada tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran (SE) yang isinya menerangkan bahwa mahasiswa yang telah menempuh 155 SKS bisa dinyatakan lulus. SE itu dikirimkan kepada semua mahasiswa tak terkecuali ustadz Fikri. Setelah mendapatkan ijazah sarjana sang ibunda tercinta, Muniroh, tidak mennyia-siakan kesempatan untuk mendorong anak sulungnya, ustadz Fikri, menjadi PNS. Begitu pula pihak SMK Muhammadiyah melakukan hal yang sama. Barangkali pihak sekolah punya kepentingan apabila diterima PNS tidak perlu membayar karena bisa minta diperbantukan.

Nasib baik sedang berpihak pada ustadz Fikri, tepat tahun 1989 PNS pun dengan mudah didapatkan dan dia tetap diberikan tempat di SMK Muhammadiyah hingga dipercaya menjadi kepala sekolah. Satu persatu kenikmatan, rizki, dan rahmat dari Allah Swt benar-benar ada pada diri ustadz Fikri. Setelah diterima PNS, dia dipercaya menjadi ketua DPD Partai Keadilan (PK- sebelum PKS lahir) kab Tegal. Dari sinilah awal karir politik dia bangun.

Tak lama berselang pemilu legislatif digelar dan PKS mendapat kursi di Kabupaten Tegal. Setahun setelah pelantikan dia menimba ilmu di UMS Surakarta ambil program pasca sarjana magister manajemen dan lulus tahun 2002.

Setelah menyelesaikan S2, dia sempat pamit kepada pengurus DPW Jateng mau kembali ke habitatnya menjadi pendidik lagi. Kendati keinginannya secara lesan telah direspon namun DPW secara tertulis tidak ada bahkan menempatkan ustadz Fikri berada di urutan pertama untuk Dapil kab Tegal, Kota Tegal, dan Kab Brebes. Fikri bercita-cita akan membawa PKS Jawa Tengah bukan partai eksklusif dan partai dakwah saja tapi terbuka yang bermanfaat untuk masyarakat, mampu tegakkan keadilan, sejahterakan masyarakat, dan tentunya bisa mencarikan solusi masyarakat.

2.8.5. M. Riza Kurniawan³⁷

Riza adalah kader muda PAN Jawa Tengah yang paling bersinar karirnya. Pria kelahiran Wonosobo 24 Februari 1971 ini menjadi Wakil Ketua DPD PAN Jawa Tengah. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten Batang tahun 2000-2005.

Selain aktif di PAN, Riza juga aktif sebagai Wakil Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, Direktur LSM Mitra Rakyat Batang, Ketua Bidang Politik Madani Jakarta, dan Ketua Bidang Jamnas Baturaden.

Selain itu, dalam Musda Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Jawa Tengah yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan KONI Provinsi Jateng hari Selasa, 28 September 2010, secara aklamasi M. Riza Kurniawan terpilih menjadi

Ketua Umum Pengda FPTI Jawa Tengah tahun 2010 - 2014 Sebanyak 26 Pengcab FPTI Se Jawa Tengah anggota Pengda FPTI Jateng yang hadir dalam Musda FPTI Jateng yang berlangsung dengan lancar dan tertib. Hanya ada 3 Pengcab yang absen mengikuti Musyawarah Anggota yang digelar setiap 4 tahun sekali tersebut adalah Kabupaten Purworejo, Kota Salatiga dan Pengcab FPTI Kabupaten Semarang.

Riza juga menyukai olah raga motor trail. Memang beberapa tahun belakangan, motor trail kembali menjadi idola seperti pada masa kejayaannya di era 1970 - 1980-an. Makin banyaknya pengguna trail tak lepas dari hobi yang kini menjadi tren di hampir seluruh penjuru kota, yakni "trabas". Yah, trabas sedang digandrungi masyarakat guna menyalurkan jiwa berpetualang di alam bebas.

Komunitas yang mewadahi pecinta trabas bermunculan dengan berbagai kegiatan, terutama di akhir pekan. Sebut saja Torsi (Semarang), Wadast (Weleri), Petra (Ungaran), Berlian Trail Community, ataupun para pencari berita yang tergabung dalam Journalist Otomotif Club (JOC).

Pecinta trabas memang berbeda dengan komunitas otomotif lainnya. Ketika komunitas lain memilih nongkrong di pinggir jalan protokol kota, penggemar trabas justru "kongkow" di hutan dengan trek naik-turun, terjal, dan berlumpur yang menjadi teman akrabnya.

Riza Kurniawan mengaku mulai menyukai olahraga ekstrem ini ekitar dua tahun terakhir. Awalnya, dia sekadar ikut-ikutan bersama rekannya, karena menilai trabas berbeda dengan olahraga lain.

Namun satu - dua kali menjajal trek di Semarang, politikus PAN tersebut akhirnya jatuh cinta. ”Trabas mengasyikkan, karena berada di alam dengan berbagai trek yang tidak lazim dilalui. Kalau orang lain bilang rintangan, maka bagi kami adalah sebuah tantangan,” kata pengguna motor trail KTM itu.

Riza menilai, trabas memiliki banyak manfaat selain olahraga. Saat menjalani trek di tengah hutan, sifat kemandirian seseorang bisa tumbuh semakin baik, karena sukses tidaknya melewati rintangan tergantung pada diri masing-masing.

Selain itu, olahraga tersebut juga menuntut kerja sama tim yang solid. Pasalnya bila sebuah trek tak bisa dilalui, maka dibutuhkan tolong menolong. Priyono, warga Pedalangan, Banyumanik mengaku untuk mengikuti trabas bukanlah perkara mudah, karena dibutuhkan mental kuat serta perlengkapan khusus.

Baginya trabas memang olahraga ekstrem dengan risiko cedera cukup tinggi. Namun hal itu bisa diminimalkan dengan penggunaan peralatan pengaman dan pengontrolan emosi yang baik. Peralatan pengaman seperti helm, pelindung tubuh, lutut, lengan, serta sepatu boot yang mumpuni wajib dikenakan. ”Olahraga ini bisa dijadikan pelatihan mengontrol emosi dan kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Pengendara harus sigap, cepat, dan tepat mengambil keputusan saat melintasi trek yang berat,” papar PNS di lingkungan provinsi itu.

Riza merupakan sosok yang senang bekerja. Kedudukan yang pernah dipegangnya adalah Direktur PT Suntime Computerindo Jakarta, Wakil Direktur

Tabloid Kontak Jawa Tengah, Komisaris Modern Entertainment, dan sekarang menjadi Komisaris PT Visual Computer Indonesia.

Namun, di tengah karirnya yang bersinar itu, Riza pernah tersandung beberapa masalah diantaranya Narkoba dan pencurian mobil³⁸. Riza yang terpilih kembali sebagai anggota dewan periode 2009-2014 dari Dapil X (Kabupaten/Kota Pekalongan, Pemalang, dan Batang) memang telah dibidik lama. Polisi menengarai, dia adalah pemain lama. Terlebih saat awal-awal menjabat sebagai anggota dewan tahun 2004 lalu, Riza pernah berurusan dengan polisi karena kasus serupa.

Dia sempat meringkuk dua bulan di tahanan Mapolda Jateng. Namun kasusnya tak sampai melenggang ke pengadilan. Riza bisa menghirup udara bebas dan kasusnya menguap, hingga akhirnya kembali tertangkap saat pesta sabu-sabu dengan Yudhik Noviantoro di Hotel Permata Hijau.

Dari catatan di kepolisian, tak hanya sekali itu saja Riza berurusan dengan polisi. Politikus yang dikenal cukup kritis tersebut ternyata pernah terlibat kasus penadahan mobil bodong akhir 2008 lalu. Ketika itu, Riza membeli tiga mobil tanpa surat-surat kendaraan dari koleganya. Mobil yang diduga kuat hasil dari kejahatan itu terdiri atas dua Inova dan satu avansa.

Bahkan, dia juga ditengarai terlibat dalam jaringan Tommy Cs yang kini telah ditangkap oleh tim dari dari Reskrim Polda Metro Jaya. Bahkan tim dari Polda Metro Jaya pernah merunut jaringan Tommy Cs ke Jawa Tengah. Hasilnya diketahui bahwa Riza membeli tiga dari sekian banyak mobil modong dari kawanannya tersebut.

Riza juga sempat dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Namun selalu mangkir dengan alasan kesibukannya sebagai anggota DPRD. Kini, selain kasus narkoba, Riza juga terancam dengan jeratan Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Kedua kasus itu kini sedang ditangani dan dialami penyidik Resmob Polwiltabes Semarang.

Riza beristrikan Heni Susilowati dan dikaruniai empat orang anak, Ansell Vilipo Kurniawan, Alta Gracia Kurniawan, Elfarado Hawar Maula Kurniawan, M. Ganna Fakhri Kurniawan.

²⁵ *Masa Reses, Proses dan Eksek.* Prihatmoko, Joko. (2006, September 28). Hal. 4

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembagian Daerah Pemilihan Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi.

²⁶ Diolah dari buku Hasil Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden 2009, KPUD Jawa Tengah, 2010

²⁶ Tokoh Jawa Tengah, 100 orang berpengaruh Berpengaruh, Citra Almamater, Semarang hal 291-294

²⁷ John Fitzgerald Kennedy (lahir di Brookline, Massachusetts, 29 Mei 1917 – meninggal di Dallas, Texas, Amerika Serikat, 22 November 1963 pada umur 46 tahun), sering disebut John F. Kennedy, Kennedy, John Kennedy, Jack Kennedy, atau JFK adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-35. Pada 1960, ia menjadi termuda yang dipilih menjadi Presiden Amerika Serikat dan termuda kedua setelah Theodore Roosevelt untuk jabatan presiden. Kennedy menjadi presiden setelah dilantik pada 20 Januari 1961. Jabatan kepresidennya terhenti setelah terjadi pembunuhan terhadap dirinya pada 1963. Ia tewas oleh terjangan peluru saat melakukan kunjungan ke Dallas (Texas) pada 22 November 1963. Kennedy roboh saat mobil terbuka yang membawanya melintas di kerumunan orang yang menyambut kunjungannya. Pada 25 November 1963, jenasanya dimakamkan di Arlington, Washington, DC. Sebanyak 800.000 orang ikut berkabung di jalanan Washington.

Kennedy adalah anggota klan Kennedy yang berdarah Irlandia-Amerika, sebuah keluarga terkemuka di dunia politik negaranya. Ia dianggap sebagai lambang liberalisme Amerika. Pada Perang Dunia II, ia dikagumi karena keberanian dan heroismenya ketika ia menyelamatkan seorang rekan pelaut di Samudra Pasifik Selatan. Kennedy mewakili Massachusetts pada 1947–1960, sebagai anggota Dewan Perwakilan dan Senat AS. Ia terpilih sebagai Presiden pada 1960 dengan kemenangan yang tipis dalam salah satu pemilu yang paling ketat dalam sejarah Amerika.

Kennedy adalah orang termuda yang terpilih sebagai presiden (jangan disamakan dengan orang termuda yang memegang jabatan presiden, sebuah rekor yang dipegang oleh Theodore Roosevelt), presiden AS pertama yang lahir di abad ke-20, dan juga presiden termuda yang meninggal.

Hingga 2005, ia juga merupakan satu-satunya pemeluk Katolik Roma yang pernah terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, presiden perwakilan Partai Demokrat dari Utara terakhir, dan presiden terakhir yang meninggal sewaktu menjabat.

Setelah pembunuhan John F. Kennedy pada 22 November 1963, dunia turut berduka cita atas kematiannya.

Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh C-SPAN yang mengurutkan presiden AS, sebuah panel sejarawan memberikan dia nilai di posisi kedua dalam keseluruhan dan populasi umum memberikan dia peringkat ketiga dari empat puluh dua presiden yang pernah menjabat. Agendanya tidak selesai karena kematiannya; kebanyakan kebijakan hak masyarakatnya menunjukkan hasil melalui penerusnya, Lyndon B. Johnson.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy diunduh pada 16 September 2011 pukul 11.40

²⁸ Robert Francis "Bobby" Kennedy (lahir di Brookline, Massachusetts, Amerika Serikat, 20 November 1925 – meninggal di Los Angeles, California, Amerika Serikat, 6 Juni 1968 pada umur 42 tahun), juga dipanggil "RFK", adalah salah satu dari adik laki-laki presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, dan ditunjuk oleh kakaknya untuk menjadi Jaksa Agung dalam pemerintahannya. Sebagai salah satu penasihat Presiden Kennedy yang paling tepercaya, ia bekerja erat dengan JFK selama Invasi Teluk Babi dan Krisis Misil Kuba. Pada 1964, setelah kematian kakaknya, ia dipilih menjadi senator dari negara bagian New York. Ia dibunuh tidak lama setelah berpidato merayakan kemenangannya dalam pemilihan pendahuluan kepresidenan 1968 di California di depan Hotel Ambassador di Los Angeles, California.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kennedy diunduh pada 16 September 2011 pukul 11.40

²⁹ Edward Moore "Ted" Kennedy (lahir 22 Februari 1932 – meninggal 25 Agustus 2009 pada umur 77 tahun) adalah senator negara bagian Amerika Serikat Massachusetts sejak 1962. Ia adalah anak bungsu dari Joseph Patrick Kennedy, Sr. dan Rose Fitzgerald Kennedy. Ia adalah adik John

F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat dan Robert F. Kennedy. Kedua saudaranya telah dibunuh. Ia meninggal dunia karena kanker yang dideritanya.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Edward_M._Kennedy diunduh pada 16 September 2011 pukul 11.40

³⁰ Profil 100 Wakil Rakyat Jawa Tengah Periode 2009-2014, Media Larindo Utama, Semarang hal 88-90

³¹ Kontingen Garuda disingkat KONGA atau Pasukan Garuda adalah pasukan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB sejak 1957. Kontingen Garuda VIII dikirim dalam rangka misi perdamaian PBB di Timur Tengah paska Perang Yom Kippur antara Mesir dan Israel yang berlangsung dari tanggal 6 sampai dengan 26 Oktober 1973, dengan tercapainya gencatan senjata di kilometer 101 dan disusul dengan keluarnya resolusi PBB 340. Kontingen Garuda VIII bertugas di daerah penyangga PBB di Semenanjung Sinai tersebut dikirim dalam 9 gelombang rotasi, dan setiap rotasi bertugas selama 6 bulan. Negara yang berkontribusi dalam pasukan perdamaian dalam wadah UNEF II tersebut yaitu dari Australia, Austria (penerbangan), Kanada (logistik), Finlandia (pasukan), Ghana (pasukan), Indonesia (pasukan), Irlandia, Nepal, Panama, Peru, Polandia (logistik), Senegal dan Swedia (pasukan).

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Kontingen_Garuda, di unduh pada 13 September 2011 pukul 9.48 WIB

³² Operasi Seroja adalah sandi untuk invasi Indonesia ke Timor Timur yang dimulai pada tanggal 7 Desember 1975. Pihak Indonesia menyerbu Timor Timur karena adanya desakan Amerika Serikat dan Australia yang menginginkan agar Fretilin yang berpaham komunisme tidak berkuasa di Timor Timur. Selain itu, serbuan Indonesia ke Timor Timur juga karena adanya kehendak dari sebagian rakyat Timor Timur yang ingin bersatu dengan Indonesia atas alasan etnik dan sejarah. Angkatan Darat Indonesia mulai menyebrangi perbatasan dekat Atambua tanggal 17 Desember 1975 yang menandai awal Operasi Seroja. Sebelumnya, pesawat-pesawat Angkatan Udara RI sudah kerap menyatroni wilayah Timor Timur dan artileri Indonesia sudah sering menyapu wilayah Timor Timur. Kontak langsung pasukan Infantri dengan Fretilin pertama kali terjadi di Suai, 27 Desember 1975. Pertempuran terdahsyat terjadi di Baucau pada 18-29 September 1976. Walaupun TNI telah berhasil memasuki Dili pada awal Februari 1976, namun banyak pertempuran-pertempuran kecil maupun besar yang terjadi di seluruh pelosok Timor Timur antara Fretilin melawan pasukan TNI. Dalam pertempuran terakhir di Lospalos 1978, Fretilin mengalami kekalahan telak dan 3.000 pasukannya menyerah setelah dikepung oleh TNI berhari-hari. Operasi Seroja berakhir sepenuhnya pada tahun 1978 dengan hasil kekalahan Fretilin dan pengintegrasian Timor Timur ke dalam wilayah NKRI. Selama operasi ini berlangsung, arus pengungsian warga Timor Timur ke wilayah Indonesia mencapai angka 100.000 orang. Korban berjatuhan dari pihak militer dan sipil. Warga sipil banyak digunakan sebagai tameng hidup oleh Fretilin sehingga korban yang berjatuhan dari sipil pun cukup banyak. Pihak Indonesia juga dituding sering melakukan pembantaian pada anggota Fretilin yang tertangkap selama Operasi Seroja berlangsung.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Operasi_Seroja, di unduh pada 13 September 2011 pukul 9.48 WIB

³³ Bambang Sadono, Pekerja Keras dari Blora, Majalah Legislatif Jakarta 2006

³⁴ UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers merupakan payung hukum yang mengatur kehidupan pers di Indonesia. Tidak hanya bagi pemilik media, pekerja pers (jurnalis) tapi juga mengatur tata cara yang berkaitan dengan masyarakat umum. Tentang bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan atau melakukan koreksi atas kinerja pers di negeri ini, termasuk kebebasan pers. Dalam praktiknya, Undang-undang Pers yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers tersebut ternyata selalu berhadapan dengan pendekatan-pendekatan lain dari sisi hukum, termasuk adanya beragam penafsiran. Di sinilah seringkali pelaksanaan kemerdekaan pers yang dijamin dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 harus menghadapi masalah-masalah teknis hukum, khususnya menyangkut kedudukan UU Pers sebagai *lex specialis* atau bukan *lex specialis*. Pro dan kontra (mendukung dan menolak) UU No. 40 Tahun 1999 sebagai *lex specialis* mengemuka dengan argumentasi yang

sama kuat. Di satu sisi, menjadikan UU No. 40 Tahun 1999 Sebagai *lex specialis* adalah jaminan menegakkan kemerdekaan pers, namun di sisi lain secara hukum—formal dan material—kedudukan UU No. 40 Tahun 1999 sebagai *lex specialis* dinilai oleh sebagian pihak belum memenuhi syarat dan memiliki banyak kelemahan.

Dari materi yang dikandungnya, UU Pers No. 40 Tahun 1999 sebenarnya telah menjamin kebebasan pers sebagai hak asasi warga negara dan wujud kedaulatan rakyat. Undang-Undang ini juga dengan tegas menolak sejumlah ancaman eksternal terhadap kebebasan pers, khususnya: (1) Penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran (pasal 4 ayat 2); (2) Tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat 3). Kepada siapa saja yang melakukan ancaman terhadap pers, menurut Pasal 18 ayat (1) dapat diancam hukuman paling lama dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta. Sementara itu, bagi perusahaan pers yang melanggar Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13, menurut Pasal 18 ayat (2), diancam pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Selain melindungi kebebasan pers, asas tanggung jawab (*responsibility*) media terhadap publik juga dikandung oleh UU Pers. Dalam bekerja pers berpotensi melakukan kekeliruan hingga menyangkut kepentingan orang atau sekelompok orang. Bagaimanapun ketika persoalan ini terjadi, bukan berarti pers bisa bebas lepas dari pertanggungjawaban atas kekeliruan yang dilakukannya. Karena pers diwajibkan menyelesaikan persoalan ini sesuai ketentuan yang diperuntukkan kepada pers. Ketika persoalan terjadi akibat karya jurnalistik yang dihasilkan oleh pers, masyarakat berhak menuntut pers untuk mempertanggungjawabkannya. Dan persoalan jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik, berupa Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai UU Pers. Karena itulah, UU Pers membatasi kebebasan pers dengan beberapa kewajiban hukum.

³⁵ Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Harapan dengan adanya UU ini, kehidupan penyiaran menjadi lebih tertata dan tertib. Keberadaan UU ini mengajak semua stakeholder penyiaran untuk masuk dalam sebuah ruang regulasi yang sama.

Proses dan sejarah advokasi UU Penyiaran ini cukup panjang. Namun setidaknya terdapat beberapa momen penting (*milestone*) sejarah tentang proses advokasi radio komunitas di Indonesia.

Sebenarnya, upaya melakukan amandemen terhadap UU no 24 tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3701) tentang Penyiaran telah coba dilakukan semenjak lama, namun kemudian reda.

Upaya advokasi muncul dan menguat kembali ketika mencuatnya rencana amandemen UU Penyiaran No 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran oleh DPR-RI periode 1999 dengan menggunakan hak inisiatifnya pada tahun 2002.

Situasi ini memberikan kesempatan bagi keterlibatan Civil Society (NGO, Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, dll) dan para pelaku/pegiat radio komunitas, baik dalam hal untuk proses maupun terutama konten (isi) dari Amandemen UU (draft RUU amandemen). Berbagai wacana dan masukan dari Civil Society dan pelaku/pegiat radio komunitas tersebut didasarkan atas kenyataan radio-radio yang ada di Indonesia saat itu, kajian/penelitian, dan Referensi serta pengalaman dari negara lain.

Setelah proses yang panjang tersebut, akhirnya pada Desember 2002 UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran telah berlaku efektif.

Setelah itu, terbentuklah institusi KPI baik di pusat dan daerah sebagai implementasi UU penyiaran yang baru, yang akan berperan sebagai “pengawal sistem penyiaran di Indonesia”.

Selanjutnya, Menteri Perhubungan mengesahkan SKM Hub no 15 tahun 2003 yang disempurnakan pada SKM Hub no 17 Tahun 2004 tentang Master plan frekuensi FM di Indonesia, dimana frekuensi untuk Radio Komunitas menempati 3 kanal terakhir, yaitu 107,7 dan 107,8 serta 107,9 Mhz.

Kini proses advokasi belum selesai, karena masih terdapat beberapa PP dan keputusan KPI yang harus ada, untuk mengimplementasikan UU 32/2002 ini.

³⁶ Tokoh Jawa Tengah, 100 orang berpengaruh Berpengaruh, Citra Almamater, Semarang hal 1-6

³⁷ Profil 100 Wakil Rakyat Jawa Tengah Periode 2009-2014, Media Larindo Utama, Semarang hal 186-188

³⁸ Kasus Nyabu Anggota DPRD Jateng Dari Pengguna Narkoba sampai Penadah Mobil Bodong, dalam <http://suamerdeka.com/v1/index.php> /read/cetak /2009/ 06/22/69063/Dari-Pengguna-Narkoba-sampai-Penadah-Mobil-Bodong. di unduh pada 16 September 2009 pukul 11.05